MISKOMUNIKASI, RENCANA KONTRAKTUAL DITANGGUHKAN

Pedagang Teras Malioboro 2 Datangi Kantor Disbud

YOGYA (KR) - Sejumlah pedagang di Teras Malioboro 2 mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Yogya, Rabu (5/7). Mereka mempertanyakan kegiatan kontraktual yang dinilai belum didahului dengan sosialisasi bersama pedagang.

Ketua Paguyuban Teras Malioboro 2 Supriyati, menjelaskan pedagang cukup kaget ketika pada Selasa (4/7) malam disebar undangan bernomor 54/570 tertanggal 4 Juli 2023. Surat tersebut terkait rencana kontraktual antara pedagang dengan pemerintah yang sedianya dimulai kemarin pukul 08.00 WIB.

"Kami spontanitas saja ke sini. Yang jelas kaget saja ada surat seperti itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya," katanya.

Kekagetan pada pedagang bukan hanya surat yang dinilai mendadak, melainkan juga pada daftar lampiran yang mencantumkan nama-nama pedagang.

Dalam lampiran tersebut dinilai ada nama-nama baru yang selama ini tidak menempati Teras Malioboro 2. Selain itu, banyak pedagang yang ternyata juga tidak masuk dalam list di lampiran tersebut. Hal itu yang menjadi keresahan sejumlah pedagang. Usai menggelar orasi di Kantor Disbud Kota Yogya, para pedagang bergeser ke Kantor UPT Pengelolaan Cagar Budaya Kota Yogya di Tukangan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Disbud Kota Yogya Ekwanto, menyebut telah terjadi miskomunikasi dalam menerjemahkan surat itu. Para pedagang juga dinilai kurang cermat dalam membaca surat secara utuh. "Membaca (surat) tidak cermat. Ada klausul yang belum tercantum dalam undangan ini akan diproses tahap berikutnya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kepala dinas namun malah disoraki. Situasinya jadi kurang kondusif," jelasnya.

Jumlah pedagang yang menempati Teras Malioboro 2 tercatat sebanyak 1.041 pedagang. Rencana kontraktual itu juga akan dilakukan secara bertahap. Tidak memungkinkan dilakukan sekaligus dalam satu waktu mengingat jumlah pedagang yang cukup banyak. Sehingga pedagang yang belum masuk dalam lampiran akan diagendakan pada tahap berikutnya.

Ekwanto menjelaskan, rencana kontraktual tersebut juga hanya bersifat administrasi. Terutama melakukan pendataan ulang data diri pedagang berikut foto terbaru. Pasalnya pada pedagang sudah menempati Teras Malioboro 2 selama satu tahun tanpa ada retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Di antaranya seperti uang kebersihan, sewa lapak, listrik, air, keamanan dan lainnya. "Itu kan masih gratis semua. Kami harus memiliki perencanaan yang lebih tertata sehingga teman-teman harus teregister semua. Untuk administrasi itu juga bertahap, sehingga tidak semua sekaligus," urainya.

Selain itu dirinya juga menjamin tidak ada pedagang baru yang masuk. Seluruhnya adalah pedagang yang selama ini menempati Teras Malioboro 2 untuk melakukan tanda tangan kontrak dengan pemerintah. Akan tetapi, kontraktual yang sedianya digelar kemarin akhirnya ditangguhkan atau ditunda karena tidak kondusif akibat miskomunikasi yang terjadi. "Tidak ada nama baru. Saya pastikan itu. Tapi akhirnya tidak bisa kita lakukan hari ini (kemarin) karena tadi melebar kemana-mana," imbuh Ekwanto.

Sesuai perencanaan penataan Malioboro, keberadaan Teras Malioboro 2 hanya bersifat sementara. Kelak seluruh pedagang akan diakomodir ke Teras Malioboro 1 yang kebutuhan infrastrukturnya disiapkan oleh Pemda DIY. **(Dhi)-f**

Revisi UU Desa Dukung Kemakmuran Desa

SLEMAN (KR) - Revisi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disepakati Baleg DPR menjadi RUU usulan DPR. Anggota DPR RI Fraksi NasDem Subardi optimis, perubahan kedua UU Desa itu akan menghadirkan kemakmuran bagi desa.

"Ada dua hal krusial, yakni penambahan masa jabatan Lurah dan penambahan dana desa. Dengan revisi ini, saya optimis desa akan lebih makmur dan lebih mandiri," kata Subardi, Rabu (5/7).

KR-Istimewa

Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi saat diskusi polemik Revisi UU Desa di Jakarta.

Dalam revisi ini, besaran dana desa naik dari sebelumnya 8,3 persen menjadi 20 persen. Dana desa tetap diambil dari dana transfer daerah senilai Rp 800 triliun per tahun. Dengan kenaikan itu, rata-rata setiap desa (dari total 74.000 desa) akan menerima anggaran Rp 1,1 miliar hingga Rp 2 miliar per tahun.

Meski demikian, Subardi mengingatkan pentingnya transparansi dana desa. Pengawasan dana desa masih cenderung lemah. Subardi juga mewanti-wanti agar dana desa yang besar tidak menjadi ladang korupsi. Pasalnya, berdasarkan data KPK, tak kurang dari Rp 433,8 miliar dana desa dikorupsi selama periode 2015-2021. Sebanyak 729 orang menjadi tersangka.

"Tambahan dana desa jangan diselewengkan. Perlu perencanaan yang baik, harus transparan, harus diawasi langsung oleh masyarakat. Ini tanggung jawab besar sekaligus pertaruhan reputasi para lurah yang dapat penambahan masa jabatan," lanjutnya.

Selain kenaikan dana desa, ada perubahan masa jabatan kepala desa atau lurah. Dalam revisi itu, masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan bisa 2 periode. Sebelumnya, masa jabatan 6 tahun dan bisa 3 periode.

"Artinya, masa jabatan sama-sama 18 tahun, hanya periodesasinya diubah," lanjut Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Revisi UU Desa tidak berlaku surut. Tetapi bagi kepala desa yang sudah masuk periode kedua sebelum UU baru berlaku, bisa maju lagi untuk periode ketiga dengan masa jabatan 9 tahun. Penambahan masa jabatan 9 tahun dibutuhkan untuk lebih fokus kepada pembangunan dan potensi sumber daya desa, mengingat dana desa juga bertambah.

"Kenapa masa jabatan 9 tahun, pertimbangannya kalau sering pilkades yang rawan konflik sosial, khawatir pembangunan desa terhambat. Maka dukungan satu paket (masa jabatan dan dana desa) ini agar desa menjadi kekuatan baru," pungkas Ketua DPW NasDem DIY itu. **(*)-f**

RK Ajak Generasi Muda Cegah Pemanasan Global

YOGYA (KR) - Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan berbicara dalam Talkshow Transisi Energi bertema 'Masa Depan Transisi Energi Terbarukan Indonesia' di Smart Green Learning Center (SGLC) Fakultas Teknik UGM Yogyakarta, Rabu (5/7)

KR-Devid Permana

Ridwan Kamil

RK sapaan akrab Ridwan Kamil memotivasi anak-anak muda, khususnya mahasiswa UGM untuk melakukan upaya-upaya konkrit dalam mencegah pemanasan global dan perubahan iklim. Yaitu dengan mulai mengubah gaya hidupnya, cara bergeraknya (mobilitas) dan lainnya agar lebih pro lingkungan.

Menurut RK, dampak negatif dari pemanasan global sudah sangat nyata, seperti banyak lahan hijau yang hilang, gagal panen, produksi kopi menurun, kematian disebabkan suhu panas dan lainnya. "Ini jangan disepelekan, maka saya memotivasi anak-anak muda ini untuk aktif memerangi pemanasan global dan perubahan iklim. Tujuannya tak lain untuk masa depan mereka (generasi muda)," ujarnya.

Pembicara lainnya yaitu Prof Ir Tumiran MEng PhD (Anggota Dewan Energi Nasional Periode 2009-2014 dan 2014-2019). Hadir pula dalam acara Dekan FT UGM Prof Ir Selo ST MT MSc PhD.

RK juga memastikan bahwa transisi energi fosil yang saat ini dipakai di kendaraan, lambat laun akan berganti menjadi energi listrik. Ini seperti halnya telefon kabel berganti menjadi mobilephone (yang tanpa kabel). "Ini hanya masalah waktu saja, lama kelamaan energi fosil akan habis, dan akan digantikan energi listrik," katanya.

Lebih lanjut RK menjelaskan, upaya-upaya transisi energi listrik untuk kendaraan terus dilakukan, salah satunya dengan memberikan subsidi. Namun, RK mengingatkan bahwa subsidi itu jangan hanya untuk kendaraan pribadi saja, tapi juga harus dan lebih banyak diberikan untuk pengadaan angkutan umum (bertenaga listrik).

"Kendaraan umum bertenaga listrik perlu diperbanyak dan disubsidi dari APBN. Tak kalah penting pengguna kendaraan pribadi diedukasi agar mau beralih menggunakan angkutan umum," pungkas RK. **(Dev)-f**

SISTEM INFORMASI MONITORING MASUK KATEGORI TERTINGGI

Program Perlindungan Anak di Yogya Dinilai Berhasil

YOGYA (KR) - Kota Yogya yang sudah masuk kategori Utama untuk predikat Kota Layak Anak (KLA) tetap berupaya menggulirkan program perlindungan anak. Bahkan program yang dijalankan dinilai berhasil seiring capaian Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak (SIMEP PA) yang masuk 10 besar nilai tertinggi.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, membenarkan hal tersebut. Dirinya juga mengapresiasi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat Ai Maryati Solihah yang turun langsung melakukan verifikasi di Kota Yogya.

"Hal ini menunjukkan komitmen KPAI kepada Pemkot Yogya untuk memberikan pelayanan khususnya perlindungan kepada anak-anak," jelasnya, Rabu (5/7).

Ketua KPAI Pusat tersebut melakukan verifikasi lapangan ke Kota Yogya atas pelaporan dalam SIMEP PA pada awal bulan ini. SIMEP PA menjadi alat ukur KPAI atas penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di daerah. Verifikasi lapangan atas pelaporan dalam SIMEP PA tersebut juga bagian dari tahapan penilaian Anugerah KPAI tahun 2023. Tim verifikasi KPAI melakukan verifikasi lapangan antara lain ke Forum Anak Kota Yogya dan satuan pendidikan ramah anak di MTs Muhammadiyah Karangkajen.

Masuknya Kota Yogya dalam 10 besar nilai tertinggi SIMEP PA menunjukkan bukti komitmen Pemkot Yogya bersama semua pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak.

"Walaupun Kota Yogya sudah berulang kali mendapatkan penghargaan, saya yakin bahwa KPAI mempunyai kacamata yang jernih terkait apa yang selama ini kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk perlindungan kepada anak-anak," imbuh Singgih.

Menurutnya, Pemkot Yogya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk melindungi hak-hak anak. Di antaranya program inklusi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana publik yang ramah anak, pelibatan anak dalam musyawarah rencana pembangunan, serta berbagai kegiatan sosial dan budaya yang memberikan kesempatan anak-anak untuk berkembang sesuai potensinya.

"Apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada anak-anak karena anak adalah aset penerus yang harus kita manage dengan baik. Kebutuhan anak harus kita penuhi, pelayanan untuk anak menjadi prioritas kita," paparnya.

Sementara predikat KLA mendasarkan pada 24 indikator yang menyangkut pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Tim KPAI Pusat perlu melihat secara langsung proses layanan yang diberikan apakah pemanfaatannya diterima dengan baik oleh anak. Sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan hak-haknya melainkan juga ada ruang untuk tampil dan berbicara dalam forum yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah. **(Dhi)-f**

SABBE SANKHARA ANICCA

Telah meninggal dunia dengan tenang dan damai
hari Selasa, 04 Juli 2023 pk. 18.53 WIB
di RS. Bethesda Yogyakarta.
Suami, Papa, Papa Mertua, Kung Kung, Saudara kami tercinta :

SUNDORO MARYOTO
(MA SUN SIONG)
马顺祥

Usia 94 Tahun
"Toko Kalimantan"
Jl. Parangtritis 27 Yogyakarta

Jenazah disemayamkan di Rumah Duka PUKJ Ruang A-B,
Jl. Sonopakis Lor Yogyakarta. Akan dikebumikan di pemakaman
Gunung Sempu 3 Bantul hari Sabtu, 08 Juli 2023.
Berangkat dari rumah duka pk. 09.00 WIB.
Upacara keagamaan secara Budha diadakan pk. 08.00 WIB.

Kami yang mengasihi :

Istri : **Ny. Farida 刘九桦**

Anak :
Titik Mitra Yani
Titik Frenita Andreani
Mariana
Titik Suwarni
Effendi (Ma Yuk Bun) - RRC

Menantu :
Iwan Sutjipto Suhardjo
Irwan Chanaka
Sandri Hertali
Su Ming Sutisna
Liu Chun Lui - RRC

Cucu :
Vincent Fabrian, Joscelind Fabiola, Natasia Shanice Chanaka,
Brandon Farrell Chanaka, Michella Nadine Lee,
Mitchell Hayden Lee, Hector Hierro, Tania Ruella,
Ma Yi Zhen (RRC)

Beserta segenap keluarga dan famili
Harap iklan duka ini dianggap sebagai HOO IM

TURUT BERDUKA CITA - P.U.K.J (0274) 377071, 3856522